

## SEJARAH PENGUASAAN HUTAN DAN POLA PEMANFAATAN LAHAN OLEH MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN HUTAN KPHP RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Lulu Yuningsih<sup>1)</sup>, Joko Pramono<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: [lulu\\_ksdhump@yahoo.com](mailto:lulu_ksdhump@yahoo.com)

<sup>2)</sup> Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang

Email: [jrpm1975@gmail.com](mailto:jrpm1975@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan sosial kehutanan yang paling krusial adalah okupasi lahan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan, pertanian dan pemukiman. Beberapa skema pola pemberdayaan masyarakat sudah diakomodir oleh pemerintah, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kendala antara lain tidak diketahuinya luas lahan garapan dan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah desa dan penguasaan kawasan hutan, serta pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar hutan KPHP Rawas. Ada dua tipe desa yakni desa lama dan desa transmigrasi dan penguasaan kawasan hutan dimulai dengan sistem pengelolaan HPH. Lahan pemukiman berkisar 30% dan 70% merupakan lahan garapan. Rata-rata lahan garapan yang dimiliki masyarakat adalah 1-2 ha. Pola pembukaan lahan pada umumnya memakai sistem tebang bakar. Saat ini interaksi masyarakat dengan hutan hanya sebatas memenuhi kebutuhan lahan garapan. Pengetahuan masyarakat tentang hutan masih kurang (<50%) menyatakan tidak tahu.

Kata Kunci : Sejarah desa dan hutan, Pola pemanfaatan lahan hutan

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang sangat erat dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, negara dan pemerintah. Kepentingan masing-masing pihak saling berkaitan dalam pengelolaan hutan tersebut, sehingga seringkali menjadi sumber konflik yang sulit diselesaikan. Beberapa gejala dari konflik sosial yang terjadi pada masyarakat didalam ataupun di sekitar kawasan hutan, dari waktu ke waktu semakin berpengaruh terhadap pengembangan pembangunan kebijakan kehutanan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam mengelola sumber daya hutan adalah permasalahan sosial masyarakat sekitar kawasan hutan seperti penebangan liar, perambahan dan okupasi lahan. Permasalahan yang krusial adalah permasalahan okupasi lahan oleh masyarakat, yang lahannya dimanfaatkan untuk areal perkebunan, areal pertanian dan pemukiman ataupun okupasi berupa klaim sebagai hutan adat.

Seiring dengan keadaan tersebut pola pengembangan kehutanan semakin merujuk pada upaya untuk mengakomodasi pemberdayaan masyarakat didalam ataupun di sekitar kawasan hutan. Beberapa skema pola pemberdayaan masyarakat dalam mengelola hutan sudah diakomodir oleh pemerintah seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), serta pola kemitraan dengan KPH ataupun dengan pemilik izin. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi kendala antara lain tidak diketahuinya luas lahan garapan dan pola pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya data dan informasi mengenai sejarah penguasaan kawasan hutan dan pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar hutan untuk menunjang upaya pengembangan kebijakan

dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

#### B. Tujuan

Untuk mengetahui sejarah desa dan sejarah penguasaan kawasan hutan, serta pola pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar hutan KPHP Rawas.

### II. METODE DAN ANALISA DATA

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian difokuskan di desa-desa yang secara administrasi wilayahnya berada di dalam dan disekitar kawasan hutan KPHP Rawas. Hasil kajian dari peta administrasi yang dioverlaykan dengan peta kawasan hutan KPHP Rawas, terdapat 16 desa yang wilayah administrasi berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Desa-desa tersebut berada di enam kecamatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Daftar desa di dalam dan sekitar KPHP Rawas

| Kecamatan   | Desa   |
|-------------|--|
| Karang Jaya | Suka Menang, Karang Jaya   |
| Rupit       | Gajah Baru, Maur Baru  |
| Rawas Ulu   | Sungai Baung, Plau Lebar, Pangkalan, Sungai Lanang   |
| Ulu Rawas   | Jangkat  |
| Nibung      | Tebing tinggi, Bumi Makmur, Sumber Sari, Sumber Makmur, Kelumpang Jaya, Srijaya Makmur, Jadi Mulya I |

#### B. Populasi dan Sample

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada di 16 desa dan secara administrasi ataupun geografis berada di dalam dan sekitar KPHP Rawas. Pengambilan data dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah dibuat

terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Arikunto (1996), apabila jumlah populasi (Kepala Keluarga) lebih dari 100, maka jumlah contoh yang dapat diambil adalah 10-15% dari Kepala Keluarga tersebut. Kepala keluarga yang dimaksud dalam penelitian adalah Bapak atau Ibu yang mewakili keluarga yang berada di desa sekitar kawasan hutan KPHP Rawas.

#### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan jenis data yang diambil adalah data kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan pengukuran data lapangan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan studi pustaka.

#### D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Sejarah desan dan sejarah penguasaan kawasan hutan
- Luas lahan administrasi desa dan luas lahan garapan
- Pola pembukaan lahan garapan, biaya pembukaan lahan dan pendapatan masyarakat
- Interaksi masyarakat dengan hutan dan pengetahuan masyarakat mengenai hutan

#### E. Metode Pengumpul Data

Data pengamatan dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan data wawancara, observasi lapangan non partisipasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur dengan memakai panduan wawancara yang berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat mengukur setiap variabel yang ditentukan untuk mencapai tujuan hasil penelitian. Dalam pengumpulan data selain wawancara akan dilakukan juga teknik *focus group discussion* (FGD) sedangkan observasi lapangan dilakukan dengan cara mensurvey langsung lokasi lahan-lahan pemukiman dan lahan garapan masyarakat.

#### F. Analisa Data

Data hasil wawancara dianalisis secara kuantitatif yang akan dinilai dengan persentase, sedangkan data-data lainnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara tabulasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah Desa

Sejarah pembentukan desa yang berada di sekitar KPHP Rawas terdiri dari dua kelompok, yang pertama adalah desa lama yang terbentuk dari rumpok-rumpok sejak tahun 1960. Masyarakat yang mendirikan rumpok-rumpok pada umumnya adalah suku Rawas. Desa-desa yang dimaksud antara lain Desa Suka Menang dan Desa Embacang Lama yang termasuk di Kecamatan Karang Jaya; Desa Batu Gajah Baru dan Desa Maur Baru Kecamatan Rupit; Desa Sungai Baung, Pulau Lebar, Sungai Lanang

dan Desa Pangkalan Kecamatan Rawas Ulu; Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas; Desa Jadi mulya I, dan Desa Tebing Tinggi Kecamatan Nibung.

Lamanya masyarakat tinggal di desa tersebut bervariasi mulai 10 sampai 40 tahun. Hasil penelitian diperoleh data lamanya masyarakat tinggal di desa seperti yang disajikan pada tabel 3.1. Masyarakat yang yang mendiami desa-desa tersebut mayoritas tinggal secara turun temurun mencapai 98,09%, sedangkan yang tinggal di desa berasal dari desa lain karena pernikahan hanya 1,99%.

Tabel 3.1. Persentasi lamanya masyarakat yang tinggal di desa lama

| Lamanya Tinggal di Desa | Persentasi |
|-------------------------|------------|
| 10 – 20 tahun           | 56,67%     |
| 21 – 40 tahun           | 25,00%     |
| ≥ 40 tahun              | 18,33%     |

Bentuk desa yang ke-2 adalah desa transmigrasi tahun 1985/1986 yang terdiri dari Desa Bumi Makmur, Sumber Sari, Sumber Makmur, Kelumpang Jaya, Srijaya Makmur, Sumber Sari, dan Desa Kelumpang Jaya Kecamatan Nibung. Masyarakat transmigrasi berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali. Lamanya masyarakat desa transmigrasi bervariasi dari kurang dari 10 tahu sampai lebih dari 30 tahun, lebih terperinci dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Persentasi lamanya masyarakat yang tinggal di desa transmigrasi

| Lamanya Tinggal di Desa | Persentasi |
|-------------------------|------------|
| ≤ 10 tahun              | 22,22 %    |
| 10 – 20 tahun           | 35,56 %    |
| 21 – 40 tahun           | 42,22 %    |

#### B. Sejarah Penguasaan Kawasan Hutan

Seiring dengan kebijakan pengelolaan hutan di era tahun 70-an, adalah dengan cara pemberian ijin kepada HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yaitu melakukan penebangan dengan menggunakan sistim silvikultur Tebang Pilih Indonesia (TPI) yang selanjutnya disempurnakan menjadi Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI). Untuk HP Meranti Hulu Sungai Kapas Kecamatan Nibung HPH yang ada saat itu antara lain PT. Buah Megow (Hutrindo Group), sedangkan HPH yang ada di kelompok hutan HP dan HPT Rawas Lakitan adalah PT Kurnia Musi Plywood Industri (KMPI). HPH tersebut sudah habis masa konsesinya di tahun 90-an. Wilayah ex Buah Megow kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan hutan industri melalui IUPHHK-HTI oleh PT. Tunas Bentala patungan dengan PT. Inhutani V. Pada tahun 1995/1996 dikeluarkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Star. Wilayah ex KMPI pernah diberikan untuk pemanfaatan hutan industri kepada PT. Persada Karya Kahuripan melalui IUPHHK-HT Kepmenhut No. SK.606/Menhut-II/2009 tanggal 5 Oktober 2009, namun perusahaan tersebut tidak melaksanakan operasional secara aktif sehingga dilakukan pencabutan izin pemanfaatan melalui SK.500/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013. Saat ini areal tersebut sedang dalam proses permohonan

UPHHK melalui mekanisme izin IUPHHK oleh perusahaan PT. Eka Yasa Dinamika.

Periode pasca HPH, lahan-lahan hutan yang telah dibuka pada periode HPH sebagian kini diubah menjadi tanaman perkebunan karet oleh masyarakat sementara sebagian lainnya ditinggalkan menjadi semak belukar atau secara perlahan kembali menempuh tahapan suksesi ke arah bentuk hutan sekunder muda dan hutan sekunder. Dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk pengurangan lahan hutan terus terjadi. Perluasan perkebunan karet juga semakin cepat ketika pada tahun 1990-an program transmigrasi dimulai di Kecamatan Rawas Ulu. Beberapa desa yang secara langsung terkena program transmigrasi mengalami percepatan perubahan lahan untuk menjadi perumahan dan perkebunan dari lahan yang semula berhutan, terlebih setelah pengembangan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kecamatan Rawas Ulu dengan daerah lain di Kabupaten Musi Rawas.

### C. Luas Administrasi Desa dan Luas Lahan Garapan

Tabel 3.3. Luas desa secara administrasi

| Desa            | Luas Adm  | Desa          | Luas Adm  |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| Suka Menang     | 2.799,91  | Jadi Mulya I  | 7.804,04  |
| Embacang        |           | Kelumpang     |           |
| Lama            | 19.372,00 | Jaya          | 2.781,18  |
|                 |           | Srijaya       |           |
| Batu Gajah Baru | 8.500,6   | Makmur        | 3.015,06  |
|                 |           | Sumber        |           |
| Maur Baru       | 2100,4    | Makmur        | 3.640,12  |
| Sungai Baung    | 5.200,7   | Sumber Sari   | 1.227,41  |
| Pulau Lebar     | 3.400,4   | Tebing Tinggi | 24.665,22 |
| Pangkalan       | 3.900,6   | Bumi Makmur   | 2.547,78  |
| Jangkat         | 3.600,8   | Sungai Lanang | 3.702,01  |

Pada umumnya persentasi lahan pemukiman di desa lama mencapai 30%, sedangkan sisanya sekitar 70% merupakan lahan garapan berupa kebun atau sawah. Untuk desa transmigrasi pada awalnya memiliki kepemilikan tanah masing-masing adalah 2ha yang terdiri dari 0,25ha lahan pemukiman dan 1,75ha merupakan lahan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan baik desa lama maupun desa transmigrasi rata-rata persentasi luasan kepemilikan lahan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4. Rata-rata persentasi luas kepemilikan lahan

| Luas kepemilikan lahan | Persentasi |
|------------------------|------------|
| ≤ 1 hektar             | 50,00%     |
| 1 – 2 hektar           | 25,00%     |
| 2 – 3 hektar           | 16,67%     |
| 3 – 4 hektar           | 8,33%      |

Penentuan batas-batas lahan milik mereka yaitu dengan cara kesepakatan dan kompromi adat serta atas dasar hukum negara. Tanda batas yang digunakan adalah dengan cara menanam pohon yang jenisnya spesifik atau dengan menanam pohon dengan jarak yang rapat.

### D. Pola Pembukaan Lahan Garapan

Pada umumnya, masyarakat mengaku bahwa lahan pemukiman dan lahan garapan merupakan lahan milik yang didapat dari warisan orang tuanya dan dari proses jual beli. Adapun proses leluhurnya memiliki lahan adalah dengan cara membuka hutan dan setiap masyarakat mempunyai akses yang sama, yang membedakan hanyalah kemampuan membuka lahan dari masing-masing masyarakat. Pola pemukiman yang dibangun adalah dengan pola pemukiman berkelompok. Alasan berkelompok adalah untuk menjaga kerukunan diantara anggota masyarakat dan menjaga kesatuan dengan alam lingkungannya, mereka berpendapat bahwa pola pemukiman berkelompok merupakan salah satu solusi yang dianggap baik. Selain itu pola pemukiman berkelompok juga mempunyai berbagai keuntungan diantaranya adalah untuk memudahkan komunikasi dan musyawarah, saling tolong menolong, dan agar terhindar dari serangan binatang buas. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dengan pola pemukiman menyebar menjadi lebih baik karena akan mengurangi konflik dengan anggota masyarakat lainnya. Selanjutnya, aktifitas masyarakat dalam membangun rumah adalah dengan bergotong royong sesama warga dan kerabat. Adapun bahan-bahan untuk membangun rumah terutama kayu ada yang diperoleh dengan cara membeli, dari hasil tanaman/kebun, dan ada yang mengambil dari hutan.

Sistim pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat pada umumnya memakai sistim tradisional tebang bakar dengan peralatan yang digunakannya juga peralatan tradisional seperti sabit, parang dan cangkul, serta pemanfaatan hewan seperti sapi/kerbau untuk proses pembajakannya. Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa persentasi masyarakat yang memakai sistim pembukaan lahan dengan cara tebang bakar mencapai 90%, menggunakan peralatan mekanis 5%, dan 5% memakai sistim semi mekanis. Tanaman yang ditanam pada umumnya adalah karet, dengan menggunakan sistim tumpang sari dengan tanaman semusim di 2 tahun pertama.

### E. Biaya Pembukaan Lahan

Biaya yang dikeluarkan untuk membuka lahan berkisar antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar. Biaya untuk pembelian bibit yang ditanam berkisar antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung jenis karet yang digunakan bibit generatif atau bibit unggul hasil rekayasa genetik.

### F. Nilai Pendapatan Masyarakat

Hasil panen pertahun yang diperoleh oleh masyarakat bervariasi bergantung pada luas lahan yang dimiliki, jenis komoditi yang ditanam serta sistim pengelolaan yang digunakan. Dari kuisisioner memberikan nilai bahwa masyarakat mendapatkan hasil panen berkisar antara 175 kg – 800kg dengan sebaran persentasi pendapatan hasil panen pertahun seperti yang tersaji pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Persentasi klasifikasi hasil panen pertahun

| Hasil panen pertahun | Persentasi |
|----------------------|------------|
| 175 - 350 kg/tahun   | 31,67%     |
| 350 – 400 kg/tahun   | 35,00%     |
| 400 – 600 kg/tahun   | 26,67%     |
| 600 - 800 kg/tahun   | 6,66%      |

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa hasil panen mereka mengalami penurunan. Hal itu dapat disebabkan oleh menurunnya daya dukung lingkungan dalam hal ini sumber daya lahan serta kondisi perekonomian yang tidak menentu. Juga dapat disebabkan oleh tidak stabilnya (rendahnya) harga komoditi pertanian.

G. Interaksi Masyarakat Dengan Hutan

Interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan di tahun 1987-1988 cukup intens terutama dalam hal pemungutan hasil hutan bukan kayu yang terdiri dari rotan (rotan udang, rotan sego, rotan temiang), damar dan jernang. Tata cara masuk ke hutan berbaur dengan masyarakat lokal kemudian berbagi hasil. Proses pembagian hasil hutan berjalan secara adat kebiasaan tapi tidak ada aturan tertulis. Keadaan ini berakhir di tahun 1995-1996.

Pada era sekarang keterikatan masyarakat terhadap sumber daya hutan sebenarnya sudah tidak ada, karena hampir seluruh kawasan hutan sudah habis di buka dan ditanami karet. Keberadaan kawasan yang berhutan hanya sporadis di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena topografinya curam atau daerah rawa. Keterikatan masyarakat dengan kawasan hutan hanyalah dari sisi kebutuhan lahannya bukan terhadap sumber daya hutannya. Sebagian besar masyarakat mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan cara berkebun karet, sawit dan sawah tadah hujan, jadi mereka bergantung hidupnya dari hasil panen kebun/sawah. Akan tetapi karena lahan usahanya sebagian ada dalam kawasan hutan maka secara tidak langsung tergantung dengan ketersediaan lahan hutan.

Kemampuan alam dalam menjaga keseimbangan sudah jauh berkurang karena sudah banyak hutan yang *terdegradasi* ataupun *terdeforestasi* akibat adanya penebangan liar yang sudah berjalan lama dan adanya pembukaan-pembukaan kawasan hutan untuk berkebun masyarakat dari tahun ke tahun, sehingga menyebabkan banyak masyarakat sulit memperoleh air terutama pada musim kemarau dan longsor akibat tanahnya mulai mengalami erosi.

H. Pengetahuan Masyarakat Dengan Hutan

Dari hasil wawancara dan kuisisioner teridentifikasi pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Persentasi pengetahuan masyarakat terhadap kawasan hutan

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tidak tahu                        | 42,00% |
| Mengetahui dari papan pengumuman  | 31,40% |
| Mengetahui dari informasi lainnya | 26,60% |

Dalam mengukur tingkat pengetahuan masyarakat didekati dengan beberapa indikator antara lain pengetahuan terhadap status hutan, pengetahuan tentang fungsi hutan dan pengetahuan mengenai flora dan fauna. Hasil pengamatan menunjukkan masih rendahnya pengetahuan masyarakat (< 50%) mengenai manfaat/fungsi hutan baik flora faunanya terhadap keberadaan alam dan lingkungan secara umum. Hal itu disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka terima baik dari pengelola hutan ataupun dari media yang lainnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan sejarah desa yang berada di sekitar kawasan hutan KPHP Rawas terdiri dari dua tipe yakni desa lama yang berasal dari pembangunan rumpok-rumpok yang didirikan oleh etnis Rawas dan desa transmigrasi. Sejarah penguasaan kawasan hutan berawal dari sistim pengelolaan HPH. Lahan pemukiman berkisar 30% dan 70% merupakan lahan garapan. Rata-rata lahan garapan yang dimiliki masyarakat adalah 1-2 ha. Pola pembukaan lahan pada umumnya memakai sistim tebang bakar. Saat ini interaksi masyarakat dengan hutan hanya sebatas memenuhi kebutuhan lahan garapan. Pengetahuan masyarakat tentang hutan masih kurang (<50%) menyatakan tidak tahu.

B. SARAN

Agar masyarakat diberi kesempatan untuk sama-sama melakukan pengelolaan hutan melalui pemberdayaan dan pembinaan pada masyarakat dengan memakai sistim yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto S. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Hartoyo. 1996. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Penerbit Universitas Terbuka. Jakarta

Isworo WI. 2001. *Pemberdayaan Organisasi Lokal Tingkat Desa*[disertasi]. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta

Koentjaraningrat. 1988. *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Penerbit Gramedia. Jakarta

Slamet M. 2003. *Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan*. Penerbit IPB Press. Bogor

Suprayitno, AR. 2011. *Model Peningkatan Partisipasi Petani sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat (Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan)*. [Tesis]. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.

Suriasumantri, J. S. 1995. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Sinar Harapan, Jakarta.